

Peran pemuda dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia

Hilda Himmatul Malikha

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: hildamalikha21@gmail.com

Kata Kunci:

Pemuda, demokrasi, partisipasi politik, literasi politik, demokrasi sehat

Keywords:

Youth, democracy, political participation, political literacy, healthy democracy Indonesian

ABSTRAK

Pemuda memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang sehat di Indonesia. Sebagai bagian penting dari demografi nasional dengan akses luas terhadap teknologi informasi, pemuda mampu menjadi agen perubahan yang mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Namun, berbagai tantangan seperti apatisme politik, minimnya pendidikan politik, dan dominasi pragmatisme menjadi penghambat keterlibatan pemuda secara optimal. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran pemuda dalam demokrasi

Indonesia serta strategi yang dapat memperkuat kontribusinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan pendidikan politik, literasi digital, dan penciptaan ruang partisipasi yang inklusif merupakan kunci untuk memberdayakan peran pemuda dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Pemanfaatan media digital oleh pemuda menunjukkan perubahan pola partisipasi politik yang semakin terbuka dan interaktif. Media sosial menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan, dan membangun gerakan sosial, meskipun juga dihadapkan pada tantangan seperti disinformasi dan rendahnya literasi politik digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pendidikan, dan masyarakat untuk mendukung peran pemuda sebagai penggerak demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Youth play a strategic role in supporting the realization of a healthy democracy in Indonesia. As a significant part of the national demographic with broad access to information technology, youth are capable of being agents of change, promoting transparency, participation, and accountability in the democratic system. However, various challenges such as political apathy, limited political education, and the dominance of pragmatism hinder optimal youth involvement. This study aims to examine the role of youth in Indonesian democracy and strategies that can strengthen their contribution. The method used is a qualitative literature review. The results indicate that strengthening political education, digital literacy, and creating inclusive participation spaces are key to empowering youth in realizing a healthy democracy. The use of digital media by youth demonstrates a shift in political participation patterns that are increasingly open and interactive. Social media has become a means to convey aspirations, criticize policies, and build social movements, although it also faces challenges such as disinformation and low digital political literacy. Therefore, synergy between the government, education, and society is needed to support the role of youth as drivers of inclusive and sustainable democracy.



Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem kehidupan bernegara yang dipilih oleh negara-negara di seluruh dunia. Teori demokrasi berasal dari tuntutan orang-orang di Barat untuk hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Ini terjadi karena, sebelum Deklarasi Amerika dan Perancis, semua orang dibeda-bedakan dalam hal kedudukannya dalam masyarakat dan hukum (Irawan, 2016).

Dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*, yang berarti pemerintahan rakyat untuk rakyat. (Rais, 1986) mengartikan demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara secara keseluruhan, mengatakan bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan tentang hal-hal penting dalam kehidupan mereka, termasuk menilai kebijakan pemerintah negara karena kebijaksanaannya menentukan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi adalah pemerintahan yang dibentuk oleh kehendak dan kekuasaan rakyat. Jika ditinjau dari sudut organisasi, itu berarti pengorganisasian negara oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat, karena rakyat memiliki kedaulatan.

Sejak Reformasi 1998, Indonesia memasuki fase baru dalam kehidupan bernegara dengan menempatkan demokrasi sebagai landasan utama yang menekankan kebebasan berekspresi, partisipasi masyarakat, serta penegakan supremasi hukum. Perubahan ini juga memperlihatkan adanya keterkaitan antara nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Soleh, 2005). Dalam kerangka tersebut, pemuda memegang peran penting sebagai agen perubahan yang tidak hanya aktif dalam partisipasi politik, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga idealisme demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepentingan bersama.

Sejarah mencatat bahwa pemuda Indonesia telah memainkan peran penting dalam berbagai momentum kebangsaan, mulai dari Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, hingga gerakan reformasi 1998. Peran aktif mereka tidak hanya terbatas pada aksi massa dan perjuangan fisik, tetapi juga dalam menyuarakan aspirasi, memperjuangkan keadilan, dan mengawal jalannya pemerintahan yang demokratis. Namun demikian, tantangan zaman yang semakin kompleks, seperti apatisisme politik, disinformasi di media sosial, dan komersialisasi politik, menuntut adanya pembaruan peran pemuda dalam format yang lebih adaptif, kreatif, dan solutif.

Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh adanya pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga oleh partisipasi aktif warga negara -terutama generasi muda- dalam proses pengambilan keputusan publik, pengawasan terhadap kekuasaan, dan penguatan nilai-nilai etika politik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran pemuda dapat dioptimalkan dalam mendukung demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemuda dalam kehidupan demokrasi Indonesia, tantangan yang mereka hadapi, serta strategi yang dapat dilakukan agar pemuda mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pembahasan

Peran Strategis Pemuda dalam Demokrasi

Pemuda saat ini menempati posisi yang strategis dalam menjaga sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Keterlibatan mereka tidak terbatas pada aktivitas elektoral seperti pemilihan umum, tetapi juga meluas ke berbagai kegiatan non-elektoral, seperti pendidikan politik, advokasi sosial, kampanye isu publik, serta fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai organisasi kepemudaan turut berperan aktif dalam menginisiasi dialog publik, pelatihan kepemimpinan, hingga gerakan berbasis komunitas yang memperkuat partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan (Esha, 2013) yang menekankan bahwa dalam demokrasi deliberatif, kualitas kepemimpinan dan partisipasi publik sangat ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor sosial, termasuk pemuda, dalam membangun ruang dialog yang inklusif, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Keterlibatan pemuda dalam ruang digital, khususnya melalui media sosial, menunjukkan transformasi peran mereka sebagai aktor penting dalam dinamika demokrasi kontemporer. Pemuda tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga berperan sebagai influencer yang aktif menyebarkan wacana politik, mengkritisi kebijakan, serta membentuk opini publik. Media sosial menjadi sarana strategis dalam menyalurkan aspirasi, memperluas jaringan solidaritas, serta mengorganisasi gerakan sosial secara cepat dan luas (Sulaiman, 2024). Fenomena ini sejalan dengan perkembangan e-demokrasi di Indonesia yang membuka ruang partisipasi publik berbasis teknologi, meskipun di sisi lain juga menghadirkan tantangan dalam hal akses, literasi digital, dan kualitas partisipasi (Slamet et al., 2009).

Lebih lanjut, demokrasi saat ini tidak hanya berlangsung dalam ranah formal, tetapi juga berkembang dalam ruang digital yang banyak diisi oleh generasi muda. Keterlibatan pemuda juga terlihat dalam berbagai forum partisipatif, seperti musyawarah publik, konsultasi kebijakan, hingga inisiatif open government yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Di berbagai daerah, partisipasi aktif pemuda dalam diskusi publik, lokakarya kebijakan, hingga penyusunan regulasi menjadi indikator penting bahwa keberlangsungan demokrasi yang sehat sangat bergantung pada kehadiran generasi muda yang kritis, partisipatif, dan berkomitmen terhadap kepentingan publik.

Di sektor pendidikan, pemuda menjadi penggerak utama dalam menyebarkan literasi politik, baik melalui komunitas, media alternatif, maupun kampanye di institusi pendidikan. Mereka mengambil peran sebagai fasilitator pendidikan demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai inklusif, toleran, dan anti-kekerasan (Taufika & Suryadi, 2025). Dalam konteks ini, pemuda tidak hanya menjadi objek pendidikan politik, tetapi juga menjadi subjek yang memproduksi pengetahuan dan membentuk kesadaran politik kolektif (Farikiansyah et al., 2024). Selain itu, pemuda juga memainkan peran sebagai agen perubahan sosial yang mendorong demokratisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengusung isu-isu progresif seperti kesetaraan gender, keberagaman, keadilan lingkungan, serta perlindungan kelompok marginal, yang berkaitan erat dengan penguatan demokrasi substantif (Estede et al., 2025).

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur pemilihan, tetapi juga perjuangan nilai dan etika publik yang dihidupi oleh generasi muda.

Dalam berbagai kasus, gerakan pemuda mampu melampaui keterbatasan institusi formal dengan membentuk aliansi lintas sektor, menggandeng akademisi, LSM, dan media untuk mendorong perubahan. Sebagai contoh, dalam advokasi terhadap isu-isu seperti pelemahan KPK, revisi UU ITE, hingga krisis iklim, pemuda menjadi garda depan yang tidak hanya bersuara, tetapi juga mengorganisir massa, menciptakan narasi tandingan, serta memberi tekanan moral dan politik kepada para pengambil kebijakan. Contoh konkret dari peran strategis pemuda dapat dilihat dalam gerakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) tahun 2020, di mana ribuan mahasiswa dan aktivis muda di berbagai daerah turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan atas regulasi yang dianggap merugikan pekerja dan mereduksi partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan. Selain itu, pemuda juga aktif dalam kegiatan pengawasan pemilu melalui organisasi seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan KAWAL PEMILU, yang melibatkan relawan muda dalam memantau proses pemungutan dan penghitungan suara secara independen. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa pemuda tidak hanya bereaksi terhadap isu, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memobilisasi massa, membangun narasi alternatif, dan menjaga integritas demokrasi secara substantif.

Dengan kapasitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari kalangan muda. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk menciptakan ruang-ruang yang inklusif, aman, dan produktif bagi partisipasi politik pemuda, baik di ranah formal maupun informal (Putri, 2025). Investasi pada generasi muda bukan hanya soal pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga tentang menjamin masa depan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Tantangan yang Dihadapi Pemuda

Meskipun memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam demokrasi, pemuda Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan struktural maupun kultural yang membatasi efektivitas peran mereka. Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya tingkat apatisisme politik, terutama di kalangan pemuda kota. Banyak dari mereka merasa kurang percaya terhadap institusi politik formal seperti partai politik, legislatif, dan lembaga negara karena dinilai tidak populis dan lebih berpihak pada kepentingan kelompok elite (Budiatri & Wiratraman, 2022). Ketiadaan kepercayaan ini menyebabkan minimnya partisipasi aktif dalam proses politik konvensional, termasuk dalam kegiatan elektoral maupun organisasi politik.

Selain itu, maraknya disinformasi dan polarisasi di media sosial menjadi tantangan serius dalam membentuk pemuda yang memiliki wawasan demokratis yang sehat. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang diskusi justru sering berubah menjadi ruang gema yang memperkuat prasangka dan menghambat keterbukaan berpikir (Nurjaman, 2025). Pemuda rentan terjebak dalam konten populis, berita palsu, dan ujaran kebencian yang mengaburkan batas antara fakta dan opini. Hal ini melemahkan kemampuan berpikir kritis, toleransi, serta keterampilan berdialog dalam

ruang publik digital. Tantangan lainnya adalah komersialisasi politik dan praktik politik transaksional yang mengakar kuat di berbagai level. Pemilu sering kali dipenuhi oleh politik uang, dari bagi-bagi uang, pencitraan yang dibuat-buat, dan mobilisasi suara yang bergantung pada jaringan antara tokoh berpengaruh dan para pendukungnya, yang pada akhirnya meminggirkan nilai-nilai idealisme yang seharusnya diusung oleh generasi muda. Dalam situasi seperti ini, banyak pemuda merasa terjebak di antara dua pilihan sulit yakni tetap setia pada nilai-nilai politik yang bersih dan idealis, atau ikut menyesuaikan diri dengan praktik politik yang lebih pragmatis dan penuh kompromi demi bisa bertahan dan berperan.

Faktor lain yang turut memperkuat tantangan ini adalah minimnya pendidikan politik yang komprehensif di jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Kurikulum formal cenderung masih berorientasi pada hafalan konsep, bukan pada pengembangan sikap kritis, keterampilan debat, dan pemahaman praktis tentang proses politik (Pratiwi, 2024). Akibatnya, banyak pemuda yang tumbuh tanpa kesadaran yang cukup tentang hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.

Tantangan-tantangan tersebut butuh perhatian serius dari berbagai pihak. Perlu adanya kebijakan yang benar-benar mendorong pemuda untuk terlibat dalam politik secara nyata, bukan hanya bersifat simbolik. Pendidikan politik yang sesuai dengan kondisi sekarang, kemampuan memahami dunia digital, dan akses yang lebih terbuka bagi pemuda untuk ikut serta dalam proses politik adalah langkah penting agar mereka bisa berperan aktif dalam membangun demokrasi yang sehat.

Strategi Penguatan Peran Pemuda

Untuk memperkuat peran pemuda dalam demokrasi, diperlukan pendekatan yang bersifat sistemik, berkelanjutan, dan partisipatif. Hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah strategi yang dapat dijadikan landasan untuk memperkuat kapasitas dan posisi pemuda sebagai aktor kunci dalam demokrasi Indonesia kontemporer. Pertama, **penguatan pendidikan politik** menjadi fondasi utama. Pendidikan politik tidak hanya perlu diperkuat di jalur formal (sekolah dan perguruan tinggi), tetapi juga di jalur non-formal seperti komunitas, organisasi kepemudaan, dan media digital. Pendekatan yang digunakan harus bersifat kontekstual dan berbasis realitas lokal, sehingga lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari pemuda (Maftuhah & Yani, 2025).

Pendidikan politik yang bersifat partisipatif dan reflektif akan membentuk generasi muda yang sadar akan hak-hak sipilnya dan mampu berpikir kritis terhadap situasi politik di sekitarnya (Hermanto et al., 2025). Kedua, dibutuhkan **pengembangan ruang partisipasi politik yang inklusif**. Ruang-ruang ini dapat berbentuk forum warga, musyawarah digital, hingga platform advokasi daring yang terbuka bagi pemuda dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis (Priatna, 2025). Dengan memanfaatkan teknologi digital, partisipasi politik dapat diperluas dan dimodernisasi untuk menjangkau pemuda di wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh aktivitas politik konvensional. Ketiga, strategi penguatan peran pemuda juga harus mencakup dorongan terhadap kepemimpinan pemuda di tingkat lokal. Pemerintah dan

lembaga masyarakat perlu memberikan dukungan terhadap inisiatif yang lahir dari komunitas pemuda, seperti gerakan sosial berbasis isu lokal, program pengabdian masyarakat, serta pembinaan kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan sosial (Kusumawati & Andiani, 2024).

Pelatihan kepemimpinan transformasional penting untuk membentuk pemuda yang memiliki kemampuan mengatur dan memimpin, menjunjung etika politik, serta berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi. Keempat, **kolaborasi lintas sektor** menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat. Pemuda tidak dapat bekerja sendiri, mereka memerlukan kemitraan strategis dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi dalam bentuk program-program penguatan kapasitas, pendanaan inisiatif pemuda, serta penyusunan kebijakan publik yang responsif terhadap aspirasi generasi muda. Kolaborasi yang dijalankan secara terbuka dan jujur turut memperkuat rasa tanggung jawab bersama, sekaligus memperdalam proses musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan politik.

Dengan menjalankan berbagai strategi tersebut, diharapkan peran pemuda dalam demokrasi Indonesia tidak lagi sekadar simbolis atau sesaat, melainkan benar-benar menjadi bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat, terbuka, dan berkelanjutan. Memperkuat peran pemuda bukan hanya soal menyiapkan generasi masa depan, tapi juga langkah penting untuk menjaga agar demokrasi tetap hidup dan relevan di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

Pemuda sebagai Agen Demokrasi Berkelanjutan

Peran pemuda dalam demokrasi seharusnya tidak hanya muncul saat krisis atau menjelang pemilu, tetapi diarahkan untuk menjadi kekuatan perubahan sosial yang aktif, kritis, dan berpikiran maju. Dalam kerangka demokrasi yang berkelanjutan, pemuda memegang peran penting sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi melalui sikap jujur, kepemimpinan yang beretika, dan kemampuan membangun kerja sama lintas sektor maupun lintas generasi.

Demokrasi yang sehat tidak bisa hanya bergantung pada keterlibatan sesaat, seperti saat pemilu atau aksi massa. Diperlukan partisipasi yang konsisten dan bermakna dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, mulai dari perumusan kebijakan, pengawasan publik, pembangunan komunitas, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan (Fukuyama, 2014). Dalam konteks ini, pemuda memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan melalui inovasi sosial, advokasi isu-isu penting, dan penguatan gerakan masyarakat dari tingkat akar rumput (Baka et al., 2026).

Sebagai bagian dari pembangunan demokrasi yang berkelanjutan, pemuda harus dibekali dengan nilai-nilai kewargaan aktif, etika politik, dan komitmen terhadap keadilan sosial dan ekologis. Peran ini sejalan dengan prinsip intergenerational equity yang menekankan pentingnya partisipasi generasi muda dalam menjamin hak-hak generasi mendatang atas sistem politik yang adil, inklusif, dan transparan. Dengan demikian, penguatan kapasitas pemuda bukan hanya investasi dalam demokrasi saat ini, tetapi juga strategi jangka panjang dalam membangun tata kelola yang berdaya tahan terhadap krisis di masa depan (Prasetyo et al., 2025).

Kesimpulan dan Saran

Pemuda memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, baik melalui partisipasi elektoral maupun non-elektoral, termasuk dalam ruang digital. Keterlibatan mereka sebagai agen perubahan terlihat dalam aktivitas advokasi, pendidikan politik, serta pengawasan terhadap kebijakan publik. Namun, peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti apatisme politik, maraknya disinformasi, rendahnya literasi politik, serta praktik politik pragmatis. Oleh karena itu, penguatan peran pemuda melalui pendidikan politik, literasi digital, penyediaan ruang partisipasi yang inklusif, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat pendidikan politik yang bersifat kritis, kontekstual, dan partisipatif bagi pemuda, sekaligus meningkatkan literasi digital agar mampu menghadapi disinformasi dan membangun ruang diskusi yang sehat di media sosial. Selain itu, perlu disediakan ruang partisipasi politik yang lebih inklusif dan terbuka, baik secara langsung maupun berbasis digital, sehingga pemuda dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil juga diharapkan berperan dalam mendorong lahirnya kepemimpinan muda yang berintegritas, sementara kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem demokrasi yang mendukung keterlibatan pemuda secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Baka, W. K., Rianse, U., Rajulan, M., Mursalim, S., Silondae, T. T. A., Sjachrawy, L. O. M. I., Satyadharma, M., & Prasetyo, E. W. (2026). *Dari Sejarah Perjuangan Menuju Masa Depan Bangsa*. Luana Publishing House.
- Budiatri, A. P., & Wiratraman, H. (2022). *Demokrasi tanpa demos: Refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia*. Lp3es.
- Esha, M. I. (2013). Kepemimpinan di era demokrasi deliberatif. *El-Qudwah: Jurnal Penelitian Integrasi Sains Dan Islam*, 8(2), 23–56. <https://repository.uin-malang.ac.id/1464/>
- Estede, S., Saputra, E., Saragih, M. W., & Ansor, M. (2025). *Hak asasi manusia di tengah polarisasi sosial*. Star Digital Publishing.
- Farikiansyah, I. M., Salamah, M. N., Rokhimah, A., Ma'rifah, L., Faruq, F. N. F., & Al Gufron, M. A. (2024). Meningkatkan partisipasi pemilu melalui literasi politik pemuda milenial dalam pendidikan kewarganegaraan. *Journal of Education Research*, 5(4), 6512–6523.
- Fukuyama, F. (2014). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Macmillan.
- Hermanto, B., Amrullah, M. F., Khu, S., Permatasari, L., Fadlilah, N., & Nugroho, B. A. S. (2025). Pendidikan Politik Bagi Siswa SMA Negeri 2 Brebes Sebagai Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih Generasi Muda di Kabupaten Brebes. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(7), 3683–3694.

- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan demokrasi di negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Kusumawati, E., & Andiani, D. (2024). Pelatihan Kepemimpinan Berbasis Komunitas bagi Karang Taruna Jakarta Barat. *Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 21–40.
- Maftuhah, L., & Yani, M. (2025). *Pilar-Pilar Pendidikan Sepanjang Hayat*. PT Arr Rad Pratama.
- Nurjaman, A. (2025). *Epistemologi Toleransi: Memetakan Etika dalam Lanskap Digital*. Tujuh Pustaka Penerbit.
- Prasetyo, D. Y., Norrahman, F. H., Ramadhani, A. D., Hilmiyah, N., Nurharizah, S., Malika, V., & Fuad, M. Y. (2025). *Strategi kebijakan global: Demokrasi, ekonomi, dan hubungan internasional*. Penerbit: Kramantara JS.
- Pratiwi, V. D. (2024). Kurikulum pendidikan politik bagi generasi muda. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 13(2).
- Priatna, I. A. (2025). *Buku Pembangunan Daerah*. Penerbit Widina.
- Putri, R. (2025). Demokrasi dalam Krisis Partisipasi: Perlukah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Generasi Muda? *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 13(1), 1–15.
- Rais, M. A. (1986). Demokrasi dan proses politik. (No Title).
- Slamet, S., Hamdan, A. R. B., & Deraman, A. (2009). *E-demokrasi di Indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis*. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/>
- Soleh, A. K. (2005). Islam dan demokrasi. *El-Jadid: Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam*, 3(1), 111–126. <https://repository.uin-malang.ac.id/15166/>
- Sulaiman, A. (2024). Media digital dan gerakan sosial: Analisis logika aksi konektif. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(2), 1913–1920.
- Taufika, R., & Suryadi, K. (2025). *Literasi Politik Gen-Z*. umsu press.